

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kepentingan nasional merupakan tujuan suatu negara yang dirumuskan dan negara yang bersangkutan akan menggunakan segala kemampuan dan alat yang dimiliki untuk mencapai kepentingan tersebut. Sejak tahun 1972 upaya-upaya yang dilakukan Australia terhadap Celah Timor (Timor Leste) menunjukkan kepentingan yang melatarbelakangi upaya-upaya tersebut. Diantaranya, di tahun 1972 Australia berunding dengan Indonesia tentang batas wilayah laut antar kedua negara yang akhirnya menyisakan masalah Celah Timor karena Portugal sebagai penguasa Timor Leste menolak untuk ikut berunding. Dilanjutkan dengan pemberian dukungan terhadap Indonesia di tahun 1975 atas invasi yang dilakukan terhadap Timor Leste, dengan alasan keamanan karena menghindari ancaman komunis yang berkembang di Timor Leste. Hingga akhirnya di akhir tahun 1980an sampai awal 1990an ditemukan potensi minyak dan gas yang terkandung di dasar laut Timor dengan jumlah yang besar. Dan di tahun 1989 Australia dan Indonesia menyetujui kesepakatan Celah Timor yang isinya membagi hasil minyak dan gas dari Celah Timor untuk Australia dan Indonesia dan dibagi secara merata. Kemudian dengan mengejutkan di tahun 1998 Australia berbalik mendukung Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kepentingan nasional Australia yang disebabkan oleh ditemukannya minyak dan gas di Celah

Timor, yang sekarang dipesengketakan oleh Australia dan Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia di tahun 1999.

Celah Timor merupakan wilayah perairan yang memisahkan antara Timor Leste dengan Australia. Dimana wilayah yang dinamakan Celah Timor ini belum memiliki status jelas mengenai negara mana yang berhak atas wilayah yang kaya akan minyak dan gas ini. Kedua negara ini sama-sama memperjuangkan dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki oleh negara masing-masing dengan tujuan memperoleh legitimasi atas wilayah yang dinamakan Celah Timor tersebut.

Alasan utama Australia dan Timor Leste memperjuangkan hak masing-masing atas Celah Timor adalah karena kandungan minyak di dasar laut Timor. Dimana minyak berkaitan secara sistematis dengan sejumlah masalah penting seperti dengan derajat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, kebijaksanaan perdagangan dan orientasi kebijaksanaan politik luar negeri secara umum. Konsekuensinya segala persoalan yang bersangkutan paut dengan minyak dan gas pasti memiliki satu prioritas tinggi dalam industri, ekonomi, perdagangan dan kebijaksanaan politik luar negeri, baik dinegara importir maupun negara eksportir sendiri, tidak peduli apakah negara itu sudah tergolong maju apalagi negara berkembang.¹

Dengan posisi minyak yang sangat setrategis tersebut membuat kedua belah pihak akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk

¹ Qystein Noreng, "Minyak Dalam Politik Upaya Mencapai Konsensus Internasional," Jakarta, 1983, hal.33, dikutip oleh Tulus Wrsito, *Diplomasi Perbatasan*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2009, hal. 69.

memperoleh hak atas Celah Timor dengan tujuan utamanya adalah hak untuk mengeksplorasi minyak yang terkandung di dasar laut Timor. Kepentingan ini muncul di akhir tahun 1980an ketika terbukti ada kandungan minyak dan gas di dasar laut Timor, dimana pada tahun 1970an kepentingan Australia atas Laut Timor ataupun Timor Leste adalah masalah keamanan nasional dari ancaman komunis.

Sehingga masalah perbatasan di Celah Timor ini menjadi menarik untuk diteliti karena permasalahan di Celah Timor ini terpaksa menyeret kedua negara yaitu Australia dan Timor Leste untuk masuk dalam suatu konflik perbatasan yang dilatar belakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara yang bersangkutan. Selain itu Celah Timor mampu merubah kepentingan nasional Australia yang semula kepentingan keamanan nasional berubah menjadi kepentingan ekonomi yang harus dicapai di Celah Timor (Timor Leste).

B. Latar Belakang Masalah .

Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara-negara di dunia. Bahkan beberapa negara yang tergolong dalam negara-negara maritim sebagian besar masyarakatnya menjalankan roda perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Seperti penangkapan ikan, pariwisata pantai atau laut, hingga pengeksplorasi gas dan minyak yang terkandung di dasar laut. Oleh karena itu banyak negara yang tidak bisa menghindari konflik dengan negara lain karena masalah perebutan batas laut, karena sumber daya

yang terkandung di dalam laut bisa memberikan keuntungan yang luar biasa.

Masalah yang disebabkan oleh batas wilayah laut yang dialami oleh banyak negara di dunia juga dialami oleh dua negara yang berbatasan langsung, yaitu Australia dan Timor Leste. Kedua negara ini berbeda pendapat dalam menentukan batas wilayah laut yang memisahkan kedua negara tersebut. Wilayah laut yang dipersengketakan antara Australia dan Timor Leste memiliki kekayaan alam berupa gas dan minyak yang melimpah. Dan wilayah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Timor Gap atau Celah Timor.

Celah Timor adalah daerah yang landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia, yaitu daerah yang terletak diantara dua titik dasar pada pulau Timor, yaitu di sebelah timur pada titik median line antara pulau Leti (Indonesia) dan pulau Yako (Timor Leste), dan di sebelah barat pada titik mulut sungai Mota Masin di perbatasan Timor Leste dan NTT. Celah Timor (Timor Gap) merupakan wilayah perairan disebelah selatan pulau Timor yang apabila ditarik sebuah garis lurus ke selatan, wilayah ini bergaris lurus dengan wilayah Australia sebelah barat. Posisi Timor Gap sendiri secara faktual berada di 0.8.18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timor.²

Sejarah Celah Timor muncul ketika Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut

²"The Geographic of Timor Gap", <http://www.wikipedia.org>, dikutip oleh Tulus Warsito, *Diplomasi Perbatasan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2009, hal. 69.

dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Karena Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Lorosa'e pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak selesai, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau Timor Gap".³

Dengan demikian Celah Timor ketika itu merupakan wilayah laut yang mempunyai garis batas yang tidak jelas, dengan negara-negara yang ada disekitarnya yaitu Indonesia, Australia, dan Portugal yang ketika itu masih menguasai Timor Leste. Hingga akhirnya pada tahun 1975 Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste dan memaksa Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia. Setelah itu pada tahun 1989 Indonesia dan Australia melakukan perjanjian tentang status Celah Timor, karena ketika itu Indonesia yang merupakan penguasa atas Timor Leste mempunyai hak untuk menentukan nasib dari Timor Leste termasuk nasib dari Celah Timor yang merupakan wilayah dari Timor Leste, meski banyak negara menganggap bahwa penguasaan Indonesia atas Timor Leste itu adalah tindakan yang tidak sah. Kemudian perjanjianpun dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dengan kesepakatan untuk melakukan pembagian secara merata atas hasil eksplorasi yang akan dilakukan di Celah Timor oleh Indonesia dan Australia, yang kemudian wilayah yang dieksplorasi oleh Indonesia dan

³" Latar Belakang Sejarah Laut Timor ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 2.

Australia di Celah Timor itu disebut dengan “ Daerah Kerjasama Area A “. Kesepakatan itu disebut-sebut sebagai balas budi Indonesia karena Australia menjadi negara yang mendukung langkah invasi Indonesia ke Timor Leste di tahun 1975.

Pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an terbukti bahwa isu tentang kandungan minyak dan gas di Laut Timor yang bernilai sangat besar hingga puluhan miliar dollar Amerika tersebut tidak hanya berita kosong, tetapi memang terbukti kebenarannya.

Hal itu juga yang membuat Timor Leste memberanikan diri menuntut kemerdekaan dari Indonesia, yaitu negara yang menguasai Timor Leste sejak 1975 hingga 1999, yang sebelumnya pemerintah yang berkuasa di Timor Leste dipegang oleh bangsa Portugal. Rakyat Timor Leste mempunyai harapan akan kemakmuran jika mereka menjadi negara yang berdaulat. Karena mereka tahu bahwa wilayah mereka mempunyai kandungan minyak dan gas yang luar biasa dan jika Timor Leste menjadi negara merdeka, maka mereka bisa mengeksplorasi kekayaan alam mereka dan dapat menjualnya yang nanti hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Timor Leste baik dibidang kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, menyediakan lapangan pekerjaan, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Mereka yakin dengan impian-impian itu karena ladang-ladang minyak dan gas yang berada di perbatasan Timor Leste dengan Australia itu berada lebih dekat dengan

wilayah Timor Leste. Dan ladang-ladang minyak dan gas itu bernilai puluhan miliar dollar AS.

Langkah penuntutan kemerdekaan Timor Leste ini mendapatkan dukungan dari Australia, yang semula Australia pada tahun 1975 mendukung Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor leste namun di tahun 1998-1999 Australia gencar mendukung kemerdekaan atas Timor Leste dari kekuasaan Indonesia.

Sumber daya alam berupa minyak dan gas, saat ini menjadi salah satu komoditi yang sangat berharga dan penting bagi semua negara. Karena hampir semua energi yang dibutuhkan negara-negara didunia yang dipergunakan untuk teknologi guna memproduksi ataupun mengkonsumsi, bersumber dari sumber daya minyak dan gas. Untuk itu minyak dan gas memiliki posisi penting dalam menentukan posisi ekonomi, politik, bahkan menentukan strategi suatu negara.

Maka konsekuensi dari kedudukannya, setiap masalah yang muncul yang berhubungan dengan sumber daya minyak dan gas akan menjadi prioritas utama suatu negara. Bahkan suatu negara yang wilayahnya mengandung minyak baik di darat ataupun di laut. Maka negara-negara itu akan rela bekerja sama dengan perusahaan minyak internasional, untuk menemukan, menggali dan mengolah, serta mengeksport sumber perminyakan mereka. Dengan demikian negara tersebut dapat menikmati hasil penjualan minyak dan gas untuk kesejahteraan negaranya.

Walau Timor Timur telah dinyatakan sebagai negara terbaru merdeka di dunia, suatu pertentangan sengit tengah terjadi di belakang layar perihal kehendak Australia untuk memiliki bagian terbesar dari satu-satunya penghasilan alam daerah kecil tersebut yaitu, deposito maha besar minyak dan gas alam di bawah Laut Timor antara kedua negara. Baik sebelum ataupun sesudah acara serah-terima kedaulatan oleh PBB, pembentukan negara baru ini didominasi oleh permasalahan yang telah mendorong dan memutar nasib Timor Timur sepanjang tigapuluh tahun terakhir; pergulatan antara para pemangsa akan penguasaan sumber-sumber alam di bawah laut.⁴

Kemerdekaan ekonomi Timor Leste tergantung pada uang yang akan di dapat oleh negara baru ini dengan cara menjual kekayaan alamnya, terutama kandungan minyak dan gas yang terdapat didasar laut Timor antara Timor Leste dan Australia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebih dari 30 miliar dollar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai selatan Timor Leste daripada pulau lainnya. Akan tetapi karena sejarah penjajahan, Timor Leste hanya bisa menerima sedikit dari setengah kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) adalah haknya Timor Leste.⁵

Antara Australia dan Timor Leste sama-sama beranggapan bahwa mereka mempunyai hak atas Celah Timor untuk mengeksplorasi

⁴Mike Head, "Australia Menggertak Timor Timur "Merdeka" Atas Minyak dan Gas", dalam <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml>, diakses 29 februari 2012.

⁵Tulus Warsito, *Diplomasi Perbatasan*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2009, hal. 70-71.

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tidak mengherankan jika akhirnya kedua negara ini terseret pada suatu keadaan dimana masing-masing negara harus mempertahankan persepsi masing-masing demi kepentingan nasional Australia dan Timor Leste untuk memperoleh hak atas Celah Timor yang mempunyai kandungan minyak dan gas yang luar biasa di dalam lautnya.

Perbedaan persepsi atas status kepemilikan Celah timor ini disebabkan karena dilatarbelakangi sejarah yang dilalui kedua negara tersebut. Terutama perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh sejarah yang dialami Timor Leste, dimana negara ini pernah berada dibawah kekuasaan dua negara yaitu Portugal dan Indonesia. Sehingga penentuan batas-batas wilayah dari Timor Leste menjadi tidak jelas. Selain itu ada perjanjian yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, tentang perbatasan yang membelah Indonesia dan Australia.

Setelah tahun 1999 Timor Leste mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri, PBB membentuk badan yang dinamai UNTAET. Badan yang dibentuk oleh PBB ini akan dilimpahi tanggung jawab menyeluruh atas penataan Timor Leste dan diberi wewenang menjalankan semua kekuasaan legislatif dan eksekutif termasuk

administrasi pengadilan. Merupakan suatu mandat dan tantangan dari suatu skop yang sedemikian luas yang jarang dicakup oleh PBB.⁶

Sehingga praktis pasca Timor Leste memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri oleh mahkamah Internasional di tahun 1999, maka seluruh pemerintahan di Timor Leste dikendalikan oleh UNTAET selama masa transisi. Dan sebuah babak baru telah dimulai di Timor Leste. Dunia Internasional menganggap semua perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh negara penguasa Timor Leste sebelumnya yaitu Indonesia dan Portugal yang bersangkutan dengan Timor Leste dianggap tidak sah. Karena pemerintahan yang sah pada masa transisi Timor Leste adalah UNTAET, maka UNTAET berhak untuk menentukan segala sesuatu yang dianggap baik untuk Timor Leste dengan segenap rakyatnya.

Perjanjian yang pernah dilakukan Indonesia dan Australia tentang Celah Timor pun dianggap tidak sah. Dan jika Australia ingin tetap mendapatkan hak untuk ikut mengeksplorasi minyak dan gas yang terkandung di dalam laut di kawasan Celah Timor, maka Australia harus mendekati pemerintah sementara yang dipegang oleh UNTAET.

Selama Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET), pemimpin-pemimpin PBB dan Timor Leste menyadari bahwa minyak dan gas yang terkandung dalam laut Timor sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi Timor Leste dalam menjalankan pemerintahannya di masa yang

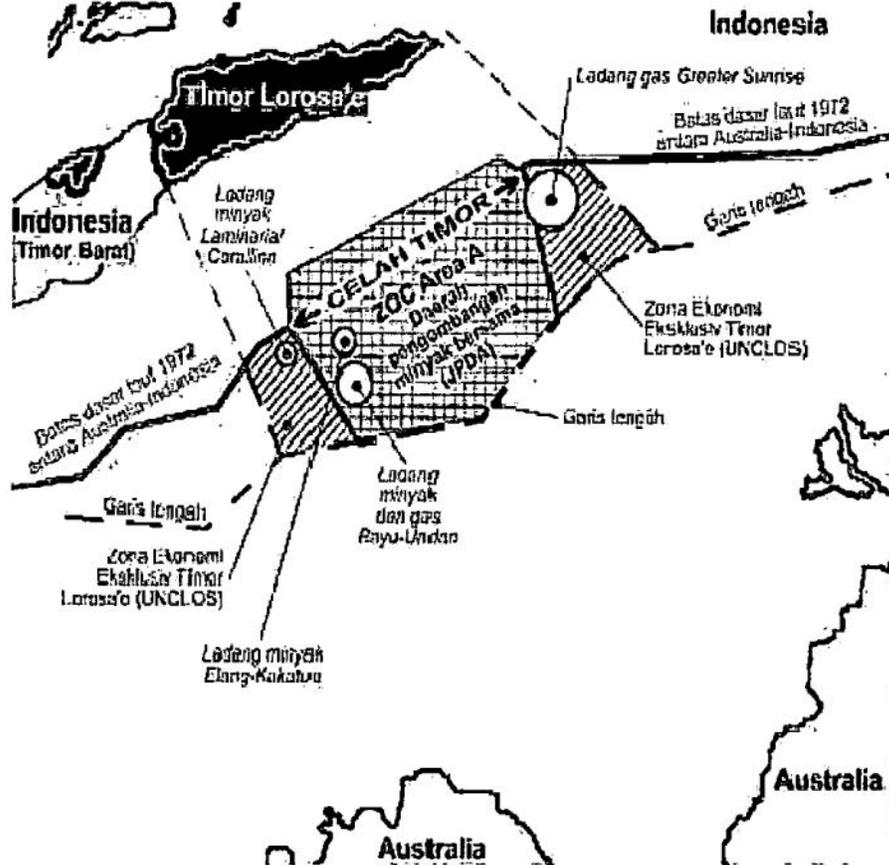
⁶Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae*, Perserikatan Bangsa-Bangsa Departemen Penerangan Publik, 2000, hal. 63.

akan datang. Karena itu mereka berupaya untuk mempertahankan kontrak-kontrak perusahaan minyak dan melanjutkan pengeksplorasian di laut Timor, dengan demikian secepatnya Timor Leste dapat menerima pendapatan dari minyak dan gas dari laut Timor.

Terdapat empat lokasi ladang minyak yang ada di area Celah Timor. Sehingga wajar jika wilayah ini menarik perhatian Australia. Nama-nama ladang minyak di Celah Timor antara lain: Elang-Kakatua, Bayu-Undan, Greater Sunrise, Laminaria-Corallina. Untuk ladang minyak Elang-Kakatua dan Bayu-Undan diperkirakan menyimpan cadangan minyak sejumlah 1.110 juta barel, sementara Greater Sunrise diperkirakan menyimpan cadangan minyak sejumlah 1.920 juta barel, dan Laminaria-Corallina diperkirakan menyimpan cadangan minyak sejumlah 270 juta barel.⁷ Alasan yang cukup kuat bagi Australia untuk berusaha menguasai Celah Timor dengan kandungan minyak yang luar biasa di dasar lautnya. Dan berikut ini adalah peta yang menunjukkan posisi Celah Timor diantara Australia dan Timor Leste:

Gambar 1. Peta Celah Timor

⁷ *Ibid*, hal. 4



(sumber: " Latar Belakang Sejarah Laut Timor ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003)

Jika batas wilayah Timor Leste berhasil dicapai dengan berpatokan dengan hukum laut yang diakui oleh PBB, maka seluruh wilayah Celah Timor yang mengandung gas dan minyak yang luar biasa dan saat ini merupakan wilayah pengeksplorasian bersama antara Australia dan Timor Leste, maka hak sepenuhnya atas kawasan tersebut akan jatuh ketangan Timor Leste. Dan secara otomatis Australia akan kehilangan segala haknya atas gas dan minyak yang ada dalam laut Timor, yang selama ini berdasarkan kesepakatan laut Timor yang

ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste pada tahun 2002 menjadikan Celah Timor sebagai daerah yang dikelola bersama antara kedua negara tersebut, dimana Australia mendapatkan 10% dari seluruh hasil yang diperoleh selama pengeksplorasian.

Fakta sejarah yang dialami laut Timor tersebutlah yang membuat status dari laut Timor atau Celah Timor itu sendiri menjadi tidak jelas. Meski secara hukum Internasional penetapan batas laut harus menggunakan "median line" (garis tengah) sesuai dengan konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁸Selain itu posisi celah timor sebenarnya berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Timor Leste. Yang jelas disebutkan pada (pasal 56 Konvensi Laut), hak-hak berdaulat negara pantai sejauh dari 200 mil dari garis pangkal laut, atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Baik dilaut maupun di dasar laut, serta lapisan tanah di bawahnya.⁹Dengan ketetapan hukum tersebut maka sudah jelas bahwa Celah Timor sepenuhnya merupakan bagian dari negara Timor Leste. Karena prinsip landas kontinental yang digunakan ketika terjadi perjanjian antara Australia dan Indonesia yang kemudian Australia berniat untuk mempertahankannya sudah tidak berlaku di mata Internasional.

Namun Australia tidak bisa juga menyerahkan haknya begitu saja karena merasa mempunyai hak dengan berpegang pada perjanjian

⁸Laurensius Molan, "Tanoni dan Perjuangan Panjang di Laut Timor", dalam <http://www.timorexpress.com>, diakses 24 september 2012.

⁹"Suara Pembaruan Daily", dalam <http://flobamora.tripod.com/minyak.htm>, diakses 26 september 2012.

yang pernah dilakukan dengan Indonesia ketika masih menjadi pemerintah di Timor Leste. Tetapi perjanjian Australia dengan Indonesia tersebut membahas masalah perbatasan dengan berpatokan pada prinsip landas kontinental. Sekarang prinsip ini tidak dipakai lagi untuk menentukan batas laut antara dua negara tetangga dengan menggunakan kedalaman air untuk menentukan batas antara mereka. Air yang kedalamannya kurang dari 200 meter (landas kontinental) diklaim sebagai ekspansi alamiah daratan teritorial suatu negara. Kesepakatan tahun 1972 tentang batas dasar laut antara Indonesia dan Australia yang mengikuti kedalaman air antara mereka itu merupakan kesepakatan yang berdasarkan pada prinsip landas kontinental. Banyak geolog atau ahli geologi yang mengatakan bahwa Timor Lorosa'e adalah bagian dari landas kontinental Australia yang tidak mempunyai batas landas kontinental antara dua negara. Ketika Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dibuat maka dengan sendirinya prinsip landas kontinental telah diganti dengan prinsip garis tengah/median line yang berpatokan pada jarak dari garis pantai.¹⁰ Oleh sebab itu sebenarnya secara hukum Internasional perjanjian Celah Timor antara Australia dan Indonesia yang masih menggunakan prinsip landas kontinental sudah tidak berlaku. Namun Australia tetap ingin mempertahankan haknya di laut Timor dengan cara membuat kesepakatan baru dengan UNTAET sebagai

¹⁰"Daftar Istilah Minyak Dan Gas", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 13.

pemerintah di masa transisi Timor Leste pada tahun 2000 serta melanjutkannya dengan kesepakatan Laut Timor di tahun 2002, dan pada akhirnya ditahun 2005 Australia baru berhasil membujuk Timor Leste untuk menunda tuntutan atas status batas wilayah di Celah Timor. Karena jika Timor Leste menuntut batas wilayah negara di laut Timor, maka hampir dapat dipastikan Australia akan kehilangan hak atas eksplorasi yang telah dilakukan di laut Timor selama ini. Untuk itu Australia dengan segala kemampuan dan alat yang dimiliki digunakanya untuk melakukan perundingan dengan Timor Leste agar menunda tuntutannya tentang batas negara di laut Timor. meskipun hak yang didapatkan Australia tidak sebesar ketika kesepakatan Timor Gap dengan Indonesia masih berlaku. Tetapi paling tidak Australia berhasil mempertahankan haknya di laut Timor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana Strategi Australia dalam mencapai kepentingan di Celah Timor (Timor Leste)?

D. Kerangka Pemikiran

1.1. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kepentingan suatu bangsa yang bertujuan untuk mencapai kelangsungan hidup bangsa, keamanan nasional, integritas wilayah dan kesejahteraan ekonomi.¹¹

Sementara Australia sendiri telah merumuskan kepentingan nasional negara Australia. perumusan kepentingan nasional dari pemerintah Australia tersebut terpapar dalam "*ADVANCING THE NATIONAL INTEREST AUSTRALIA*", dalam bentuk white paper yang merupakan tulisan resmi dari pemerintah Australia yang dirilis pada tahun 2003.

Dan dalam paper tersebut diuraikan bahwa kepentingan nasional dari Australia adalah "*Promoting good governance, human rights and development, Protecting Australians abroad, Projecting a confident Australia*".¹² (mempromosikan terhadap dunia internasional bahwa pemerintahan Australia adalah pemerintahan yang baik, mempromosikan hak asasi manusia ke seluruh dunia serta mempromosikan pembangunan yang terjadi di Australia, kemudian Australia berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang berada di luar

¹¹ Hans J. Morgenthau, (Kenneth W. Thompson 2010), Politik Antar Bangsa, terj. S. Maimoen & A.M. Fatwan, *Cecep Sudrajat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 33.

¹² "*ADVANCING THE NATIONAL INTEREST AUSTRALIA*", hal. 113, dalam www.dfat.gov.au/anj diakses 9 Desember 2012

negeri, dan Australia juga berkepentingan untuk mewujudkan kepercayaan diri Australia.)

Mempromosikan pemerintahan yang baik serta mempromosikan HAM dan pembangunan di Australia, artinya Australia ingin dipandang sebagai negara yang baik dan patut untuk dicontoh oleh negara lain sebagai negara yang liberal dengan pemerintahan yang baik (demokratis), kemudian sebagai negara yang melindungi HAM, dan negara yang melakukan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara sebagai negara yang baik dan sesuai dengan salah satu tugas negara yang harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya, maka Australia juga memasukkan poin memberikan perlindungan bagi warga negara bukan hanya yang ada di Australia, tetapi juga warga negara yang ada di luar negeri. Australia ingin menjalankan tugas sebagai negara dengan baik dan merasa bertanggung jawab atas semua warga negara Australia.

Dan kepentingan Australia yang terakhir adalah mewujudkan Australia yang percaya diri. Dalam hal ini terkait dengan keamanan nasional, dimana Australia masih merasa kurang percaya diri ketika keamanan nasional Australia masih belum tercapai. Baik ancaman yang berasal dari luar ataupun ancaman dari dalam. Karena dengan masih merasa terancamnya Australia maka untuk melakukan pembangunan di segala bidang negara Australia akan terasa sulit, misalnya untuk melakukan kerjasama dengan negara lain yang dulunya di artikan sebagai

negara yang mengancam seperti China, jika China tidak bisa memberikan jaminan dan pengertian kepada Australia bahwa China bukan lagi sebagai negara yang mengancam Australia maka Australia akan sulit menerima China sebagai negara yang bisa diajak bekerja sama. Itu sebabnya Australia mempunyai kepentingan untuk membuat negaranya merasa percaya diri dan untuk mencapai hal tersebut Australia harus mewujudkan keamanan nasional Australia.

Dari perumusan kepentingan Australia tersebut sebenarnya untuk usaha pencapaian kepentingan tersebut tidak bisa terlepas dari pengaruh nilai-nilai yang dianut oleh Australia itu sendiri. Dimana nilai-nilai dari Australia yang dipelihara hingga saat ini adalah "*Australians value tolerance, perseverance and mateship, value the individual worth of every man and woman in our society. Australia is a liberal democracy*".¹³

Artinya dalam mencapai kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya Australia tetap memperhatikan nilai-nilai dari bangsa Australia itu sendiri. Diantaranya Australia sebagai negara yang penuh toleransi, pekerja keras dan kesatuan nasional, nilai bangsa Australia yang menghargai semua hak baik laki-laki ataupun perempuan secara sama, kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting adalah Australia sebagai negara yang demokratis dan liberal. Maka untuk mencapai

¹³ *Ibid*, hal. vii

kepentingan nasional maka Australia tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dari bangsa Australia itu sendiri.

Dengan memahami nilai-nilai dari bangsa Australia maka dapat dilihat bahwa strategi atau langkah-langkah yang dilakukan Australia untuk mencapai kepentingan nasional tidak bisa terlepas dari nilai-nilai bangsa Australia itu sendiri. Strategi tersebut adalah, Australia mengadakan kesepakatan dengan Indonesia di tahun 1989 mengenai Celah Timor, Australia mendukung Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia melalui PBB, lalu Australia ingin mempertahankan kesepakatan Celah Timor yang disepakati dengan Indonesia tahun 1989 mengenai Celah Timor dengan melakukan perundingan dengan Timor Leste yang kemudian Australia berhasil mencapai kesepakatan dengan mempertahankan isi kesepakatan Celah Timor dengan Timor Leste yang dikenal dengan kesepakatan Laut Timor.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Australia maka hal itu menunjukkan bahwa dalam pencapaian kepentingan nasional, Australia tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang berkembang di Australia itu sendiri.

1.2. Kekuatan Politik "Power"

Untuk memperoleh tujuan kepentingan nasional sebuah negara, maka negara tersebut akan menggunakan kekuatan politiknya dalam setiap hubungan yang dilakukan dengan pihak lain yang merupakan objek dari kepentingan nasional negara tersebut.

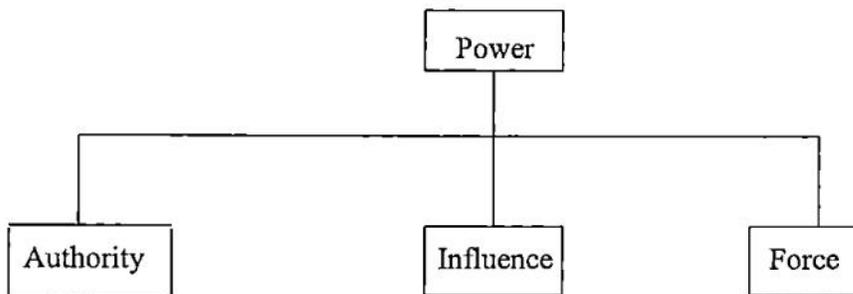
Kekuatan politik “power” menurut Hans J. Morgenthau merupakan, hubungan psikologis antara pihak pelaksana dan pihak yang terkena. Kekuasaan politik memberikan kepada pihak yang disebut pertama pengawasan atas tindakan tertentu oleh pihak yang disebut terakhir, melalui dampak yang diakibatkan pihak pelaksana atas pihak yang terkena. Pengaruh itu berasal dari tiga sumber: harapan akan keuntungan, rasa takut akan keadaan yang merugikan, dan rasa hormat dan kasih sayang kepada manusia atau lembaga. Kekuasaan itu dapat pula digunakan melalui perintah, ancaman, wewenang atau karisma orang atau jabatan atau gabungan dari mana saja.¹⁴

Menurut Coulombis dan Wolfe definisi dari Kekuatan Politik atau power secara luas adalah power bisa merujuk pada apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Dalam hal ini power atau kekuatan politik bisa dilihat sebagai pemilik tiga unsur penting. *Pertama*, adalah daya paksa (force), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai kepentingan politik A. Unsur *kedua* adalah pengaruh (influence), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur *ketiga* adalah wewenang (authority), yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan

¹⁴Hans J. Morgenthau, (Kenneth W. Thompson), *op cit.*, hal. 35.

(nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.¹⁵ Dengan demikian konsep kekuatan politik atau power bisa digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2. Konsep *Power* Mohtar Mas' oed



Untuk menganalisa lebih lanjut tentang langkah-langkah yang dilakukan Australia terhadap Timor Leste dan Indonesia untuk mencapai kepentingannya penulis bisa menggunakan konsep kekuatan nasional yang didefinisikan oleh Hans J. Morgenthau, sebagai alat untuk mencapai kepentingan Australia tersebut.

Menurut fakta yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa Australia menggunakan dua dari tiga sumber pengaruh yang diterapkan terhadap Timor Leste untuk kepentingan di laut Timor tersebut. Dua sumber pengaruh tersebut adalah, harapan akan keuntungan, dan rasa takut akan keadaan yang merugikan. Australia memberikan harapan dan

¹⁵ Mohtar Mas' oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 118-119.

keuntungan terhadap Timor Leste, dengan menjanjikan taraf hidup yang lebih baik dengan diterapkannya demokrasi setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia. Australia memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia merupakan bentuk pemberian harapan dan keuntungan terhadap Timor Leste dengan kekuatan politik yang dimiliki Australia. Dengan langkah tersebut berarti Australia telah menerapkan salah satu sumber pengaruh terhadap Timor Leste.

Kemudian sumber pengaruh kedua yang digunakan adalah rasa takut akan keadaan yang merugikan. Australia menggunakan sumber pengaruh yang lainnya yaitu pihak yang terkena kekuatan politik dalam hal ini Indonesia merasa akan mengalami kerugian jika tuntutan Australia yang didukung oleh dunia Internasional termasuk Amerika Serikat dan PBB, atas kemerdekaan Timor Leste tidak dipenuhi Indonesia. Selain itu Australia juga membuat Timor Leste merasa akan mengalami kerugian jika tidak menyetujui tawaran yang diajukan oleh Australia. Dan ketika kesepakatan laut Timor baru di bahas lebih lanjut oleh kedua negara, perdana menteri Australia JohnHoward menyatakan bahwa Australia akan mempertahankan 1.200 pasukan di Timor Timur "selama masih dibutuhkan". Sebagaimana pandangan beberapa pengamat, walau pemampilan pasukan ini ditujukan langsung untuk menghindari timbulnya aktivitas para milisi pro-Indonesia, kepentingan utama

Canberra adalah pengamanan operasi minyak dan gasnya.¹⁶ Dengan ancaman tersebut, Timor Leste mengambil keputusan untuk menyetujui tawaran-tawaran yang diajukan Australia untuk menghindari hal-hal yang dirasa akan merugikan bagi Timor Leste.

Dengan menerapkan dua dari tiga sumber pengaruh terhadap Timor Leste tersebut Australia berhasil membuat pengendalian terhadap Timor Leste dapat di terapkan, sehingga Timor Leste bersedia mengikuti apa yang menjadi tuntutan Australia yang pada akhirnya menjadika kesepakatan laut Timor sebagai buah dari keberhasilan Australia dalam melakukan hubungan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya menggunakan sumber-sumber pengaruh yang telah dimilikinya terhadap negara yang merupakan objek dari kepentingannya.

1.3. Diplomasi

Diplomasi menurut *the Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah “ The art of negotiation , especially of treaties between states; political skill.” (seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara; keahlian politik).¹⁷

Selain itu definisi lain dari diplomasi menurut S.L. Roy adalah “seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan

¹⁶Mike Head, “Australia Menggertak Timor Timur “Merdeka” Atas Minyak dan Gas”, dalam <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml>, diakses 29 februari 2012.

¹⁷ S.L. Roy, *DIPLOMASI*, terj.Harwanto dan Mirsawati, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 2

negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.”¹⁸

Sementara tujuan utama dari diplomasi adalah acquisition (mendapatkan sesuatu), preservation (pemeliharaan), augmentation (penambahan), proper distribution (pembagian yang adil) . Dan jika negosiasi mengalami jalan buntu dalam mencapai tujuan dari diplomasi tersebut, maka ancaman nyata dapat dilakukan. Dan bila memungkinkan maka perang adalah cara terakhir yang ditempuh negara untuk mencapai kepentingan yang telah dirumuskan.

Sementara itu menurut Kautilya, suatu negara bisa mencapai tujuan-tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara. Pencapaian itu bisa dilakukan dengan penerapan satu atau kombinasi beberapa prinsip dari empat prinsip utama instrumen diplomasi yaitu *sama* (perdamaian atau negosiasi), *dana* (memberi hadiah atau konsesi), *danda* (menciptakan perselisihan atau memecah belah), *bedha* (mengancam atau menggunakan kekuatan nyata).¹⁹

Dengan memahami definisi dari diplomasi, maka dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh Australia untuk mencapai kepentingan di Celah Timor (Timor Leste). Dimana Australia telah menggunakan dua dari empat prinsip utama instrumen dari diplomasi. Yaitu *sama*, dengan bernegosiasi dengan Indonesia pada

¹⁸ *Ibid*, hal. 5

¹⁹ *Ibid*, hal. 16

tahun 1972 tentang perbatasan laut antar kedua negara, dan juga dengan Timor Leste untuk mencapai kepentingan nasional Australia di Celah Timor. Selain itu Australia juga menggunakan instrumen diplomasi *dana* atau memberi hadiah atau konsesi terhadap Timor Leste ketika bernegosiasi masalah perbatasan pada tahun 2000-2005, dimana Australia memberikan tambahan pendapatan dari pengeksplorasi minyak di Celah Timor kepada Timor Leste agar Timor Leste bersedia menunda tuntutan perbatasan antara Australia dan Timor Leste.

E. Hipotesa

Strategi yang telah dilakukan oleh Australia untuk mencapai kepentingannya di Celah Timor (Timor Leste) diantaranya:

- Tahun 1972 Australia berunding dengan Indonesia tentang batas wilayah laut untuk memperjelas integritas wilayah Australia.
- Tahun 1998 Australia mendukung Timor Leste merdeka dari Indonesia dengan harapan bisa memperbaharui kesepakatan Celah Timor yang mulai dipertanyakan dunia internasional karena posisi Indonesia di Timor Leste dianggap ilegal.
- Tahun 2000-2005 Australia mempengaruhi UNTAET dan berunding dengan Timor Leste guna mencapai kepentingan di Celah Timor untuk mempertahankan hak mengeksplorasi minyak dan gas di Celah Timor.

F. Definisi Operasional

- a. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, merupakan sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.²⁰ kepentingan utamanya adalah:
1. Hak untuk mempertahankan diri adalah hak yang dimiliki oleh negara untuk mempertahankan diri dari segala hal yang memungkinkan untuk merugikan negara.
 - Indikatornya adalah: meningkatkan kemampuan militer untuk mendukung sistem pertahanan negara.
 2. kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya.
 - Indikatornya adalah: melakukan perlawanan terhadap negara lain yang ingin melakukan penjajahan terhadap negara yang bersangkutan.
 3. integritas wilayah adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah politik yg lebih kecil yg mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu.
 - Indikatornya adalah: Australia mengklaim Celah Timor adalah bagian dari wilayah Australia, karena menganggap Celah Timor masuk wilayah teritorial Australia berdasarkan landas kontinental.

²⁰ Mohtar Mas'oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 140

4. keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya dan bebas dari segala ancaman.

- Indikatornya adalah: Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste karena Australia merasa terancam oleh komunis yang berkembang di Timor Leste.

5. kesejahteraan ekonomi adalah menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan segala kebutuhannya terpenuhi.

- Indikatornya adalah: Australia berunding tentang kesepakatan Celah Timor dan Kesepakatan Laut Timor untuk mengeksplorasi minyak di Celah Timor guna mendapatkan keuntungan ekonomi.

b. Menurut Coulombis dan Wolfe definisi dari Kekuatan Politik atau power adalah power bisa merujuk pada apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Dalam hal ini power atau kekuatan politik bisa dilihat sebagai pemilik tiga unsur penting.

1. *Pertama*, adalah daya paksa (force), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai kepentingan politik A.

- Indikatornya adalah: Australia menggunakan kekuatan militer di Timor Leste untuk menekan Indonesia agar memberikan kemerdekaan kepada Timor Leste pada tahun 1999.
2. *kedua* adalah pengaruh (influence), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A.
- Indikatornya adalah: Australia memberikan bantuan kepada Timor Leste agar bersedia diajak berunding untuk menunda penetapan batas wilayah laut Timor pada tahun 2000-2005.
3. *ketiga* adalah wewenang (authority), yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.²¹
- Indikatornya adalah: Australia menggunakan kewenangan yang diberikan PBB untuk memasukkan militer Australia di Timor Leste selama masa transisi.
- c. diplomasi menurut S.L. Roy adalah “seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi

²¹Ibid, hal 118-119.

mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.”²² Dan didalam diplomasi terdapat empat prinsip instrumen yang dapat digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasional. Empat instrumen tersebut adalah:

1. *sama*, yaitu menggunakan cara perdamaian atau negosiasi dalam berdiplomasi guna mencapai kepentingan negara.
 - Indikatornya adalah: Australia bernegosiasi dengan Indonesia dan Timor Leste untuk mencapai kepentingan nasional.
2. *dana* yaitu cara berdiplomasi dengan cara memberi hadiah atau konsesi dengan tujuan pihak yang menerima hadiah atau konsesi akan memenuhi keinginan pihak atau negara yang memberikannya.
 - Indikatornya adalah: Australia memberikan tambahan pendapatan dari hasil eksplorasi minyak di Celah Timor kepada Timor Leste agar Timor Leste menunda tuntutananya tentang perbatasan di Laut Timor.
3. *danda* yaitu cara berdiplomasi untuk mencapai kepentingan dengan mengancam atau menggunakan kekuatan nyata terhadap negara lain yang menjadi objek kepentingan.
 - Indikatornya adalah: penggunaan militer untuk mengintimidasi pihak lawan.
4. *bedha* yaitu menciptakan perselisihan atau memecah belah.

²² *Ibid*, hal. 5

- Indikatornya adalah: menciptakan perang saudara di pihak lawan agar konsentrasinya terpecah.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Kepentingan Australia atas Celah Timor (Timor Leste).
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Australia dalam rangka mencapai kepentingan nasional di Celah Timor.

H. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode library research, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

I. Jangkauan Penulisan

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini penulis mengambil jangkauan antara tahun 1972 hingga 2005.

Pada tahun 1972 Australia dan Indonesia merundingkan batas wilayah laut kedua negara dengan prinsip landas kontinental, tanpa membahas tentang Celah Timor karena ketidaksediaan Portugal sebagai pemerintah Timor Leste ketika itu untuk ikut berunding. Pada 1989 Australia dan Indonesia menyetujui kesepakatan Celah Timor, tahun 1999 Australia mendukung Timor Leste merdeka dari Indonesia, tahun 2000 kesepakatan Laut Timor dibuat antara Australia dan Timor Leste

dibawah pemerintahan UNTAET. Pada tahun 2005 terjadi kesepakatan antara Australia dan Timor Leste mengenai status Celah Timor.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, kerangka pmikiran, tujuan penelitian, metodologi penulisan, jangkauan penulisan, sistematika penulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya adalah:

Bab I, Pendahuluan

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Hipotesa
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Tujuan Penelitian
- G. Metodologi Penulisan
- H. Jangkauan Penulisan
- I. Sistematika Penulisan

Bab II, Profil Celah Timor

- A. Letak Geografis Celah Timor
- B. Sejarah Celah Timor
- C. Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Celah Timor
- D. Masalah Yang Terjadi Berkaitan Dengan Celah Timor

Bab III, Kepentingan Australia di Celah Timor (Timor Leste)

A. Periode 1972-1975,

- Kepentingan Australia Untuk Keamanan Nasional

B. Periode 1989-1999,

- Kepentingan Australia Untuk Menguasai Celah Timor
- Kepentingan Australia Untuk Menunjukkan Diri Sebagai

Polisi Di Kawasan Asia

C. Periode 2000-2005

- Kepentingan Australia Untuk Mempertahankan

Kesepakatan Celah Timor

Bab IV, Upaya Australia Untuk Mencapai Kepentingan Di
Celah Timor (Timor Leste)

A. Periode 1972-1975

- Perundingan Antara Australia Dan Indonesia Tentang Batas

Wilayah Laut

- Dukungan Australia Terhadap Invasi Indonesia Atas Timor

Leste

B. Periode 1989-1999

- Kesepakatan Celah Timor Antara Australia Dan Indonesia
- Dukungan Australia Terhadap Kemerdekaan Timor Leste

C. Periode 2000-2005

- Kesepakatan Laut Timor Antara Australia Dan Timor Leste
- Negosiasi Australia Dan Timor Leste Untuk Menunda

Penetapan Perbatasan Di Celah Timor